

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan proses penyusunan laporan keuangan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Negara/APBN pada Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai penyusunan laporan keuangan yaitu, petugas SAIBA, petugas SIMAK BMN, persediaan dan bendahara pengeluaran. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber dana di BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proses perencanaan anggaran dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga atau yang disingkat RKA-K/L yang nantinya di sahkan sebagai dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Proses penatausahaan penggunaan Anggaran Negara dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran. Laporan pertanggungjawaban untuk penerimaan dan pengeluaran setiap bulan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh bendahara kepada PPK dan Kepala Balai.

Laporan Akhir dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara adalah dalam bentuk Laporan Keuangan. Isi dari Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan tersebut yang nantinya akan dilakukan Audit oleh Pemeriksa baik Internal (Inspektorat Jenderal Kementerian LHK) dan eksternal (BPK RI). Hasil pemeriksaan oleh BPK RI nantinya akan diperoleh opini mengenai kualitas laporan keuangan suatu instansi kementerian (WTP, WDP, dan Disclaimer).

Kata Kunci: Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the process of preparing financial statements as a basis for accountability for the use of State Finance/APBN at the BPPHLHK Office for the Java Bali Nusa Tenggara Region. The research uses a qualitative approach. Informants in this study were employees of preparing financial reports, namely SAIBA officers, SIMAK BMN officers, inventory and expenditure treasurers. Data collection by observation, interviews and documents.

The results of the study stated that the source of funds in the BPPHLHK for the Java Bali Nusa Tenggara Region was from the State Budget (APBN). The budget planning process is stated in the Work Plan and Budget of State Ministries/Agencies or abbreviated as RKA-K/L which will later be legalized as a Budget Implementation List (DIPA) document. The process of administering the use of the State Budget is recorded by the Expenditure Treasurer. Accountability reports for receipts and expenditures every month are reported and accounted for by the treasurer to the PPK and the Head of the Balai.

The Final Report of accountability for the use of the state budget is in the form of a Financial Report. The contents of the Financial Statements consist of LRA, Balance Sheet, Operational Report, and Statement of Changes in Equity. The Financial Report will later be audited by both Internal Auditors (Inspectorate General of the Ministry of LHK) and external (BPK RI). The results of the examination by BPK RI will later obtain an opinion regarding the quality of the financial statements of a ministry agency (WTP, WDP, and Disclaimer).

Keywords: State Financial Accountability Process, BPPHLHK Java Bali Nusa Tenggara Region